

**Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus Pada Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri)**

Rifqi Zuchal Ghozali¹, Abu Talkah², Eka Askafi³

¹ Universitas Islam Kediri

Email: rifqizuchalghozali@gmail.com

² Magister Manajemen Universitas Islam Kediri

Email: abutalkah@uniska.ac.id

³ Magister Manajemen Universitas Islam Kediri

Email: eka.askafi@gmail.com

Abstract

The tourism sector is one sector that is utilized by various regions in Indonesia in increasing the independence and prosperity of its people. especially in the current era of regional autonomy, the Regional Government of Kediri Regency needs to develop the tourism sector as an effort to increase Local Revenue (PAD). The purpose of this study was to determine and analyze the condition of tourism in the District of Kediri, the development of the tourism sector, the factors that influence tourism development, as well as the obstacles experienced in developing tourism as an effort to increase the Regional Original Revenue (PAD) of Kediri Regency. The instrument in this study used interview guidelines conducted by direct observation of the research subjects. Based on the results of research and discussion that the condition of tourism in the area of Kediri Regency has enormous potential as one of the supporting sectors of regional development. Tourism development has a large enough potential to continue to be increased so that it contributes to the increase in input on the Regional Original Revenue (PAD). Factors that influence the development of the tourism sector include established regulations, qualified and competent human resources, budget funds, and real participation from the community. Obstacles related to the development of the tourism sector are the low quality of Human Resources (HR) as a manager of tourism and tourism objects, the limited facilities and infrastructure as well as the marketing network, and the non-optimal management and development of the tourism potential of Kediri Regency.

Keywords: Development, Tourism Sector, PAD, Kediri Regency.

Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dimanfaatkan oleh berbagai daerah di Indonesia dalam meningkatkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk itu pada beberapa tahun terakhir ini, hampir semua daerah di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk terus mengembangkan sektor pariwisatanya. Karena, sektor pariwisata dapat digunakan menjadi salah satu sektor andalan sebagai sumber ekonomi bagi suatu daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Spillane (2006) yang menyatakan bahwa, "secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan yang menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik".

Pendapat ini didukung juga oleh per-Undang-Undang Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa, "penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa". Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa, sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan

pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan objek untuk mendatangkan investor serta menciptakan konsumsi yang baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Menurut Pitana dan Diarta (2009) mengatakan bahwa, “terdapat delapan dampak pariwisata yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa; (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat; (3) dampak terhadap kesempatan kerja; (4) dampak terhadap harga-harga; (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan; (6) dampak terhadap kepemilikan dan control; (7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya; dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah”. Dari berbagai dampak yang terjadi akibat pengembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini digunakan sebagai cerminan dari kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan salah satu caranya adalah mengembangkan bidang pariwisata. Menurut Pitana dan Diarta (2009) mengatakan bahwa, “terdapat delapan dampak pariwisata yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa; (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat; (3) dampak terhadap kesempatan kerja; (4) dampak terhadap harga-harga; (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan; (6) dampak terhadap kepemilikan dan control; (7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya; dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah”. Dari berbagai dampak yang terjadi akibat pengembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini digunakan sebagai cerminan dari kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan salah satu caranya adalah mengembangkan bidang pariwisata.

Akan tetapi masih banyak daerah di Indonesia yang masih sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat dalam mengatur pembiayaan daerahnya masing-masing karena, masih minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Indra Rindu Datu K. (2012) menjelaskan bahwa, “penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya”. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepala daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor khususnya sektor pariwisata agar lebih produktif lagi.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata ini tidaklah mudah dan perlu penanganan yang tepat dan sesuai dengan sasaran dengan melibatkan semua pihak, baik pihak masyarakat, swasta, dan pihak pemerintah terkait dengan sektor pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengembangkan sektor pariwisata, yang secara tidak langsung juga menjadi penyebab rendahnya atau kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebuah kabupaten/kota diberbagai daerah terutama Kabupaten Kediri. Beberapa hambatan atau penyebab kurang maksimalnya peningkatan sektor pariwisata yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dipaparkan oleh pendapat menurut Nafsi Hartoyo (2017) menjelaskan bahwa, “pertama kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi daerah, kedua kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah, ketiga kelemahan sistem hukum dan administrasi pendapat daerah, keempat kelelahan kualitas SDM aparatur, kelima keawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan program, keenam ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai, dan ketujuh seringkali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggaran”. Dari penjelasan dan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, hambatan yang terjadi dan dialami pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di daerah

Kabupaten Kediri adalah kurangnya pemerintah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, dan lemahnya kualitas SDM yang ada dalam menangani pengembangan sektor pariwisata sehingga menyebabkan sistem hukum, birokrasi, dan administrasi yang diterapkan kurang jelas dan kurang optimal. Hal ini juga menjadi penyebab utama kurang optimalnya hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah yang masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor pariwisata.

Berdasarkan dari penjelasan dan data yang sudah penulis ungkapkan diatas dapat diketahui bahwa, melalui otonomi daerah yang telah ditetapkan pemerintah dan potensi-potensi dari berbagai sektor diberbagai daerah khususnya sektor pariwisata maka pemerintah daerah kabupaten/kota perlu untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Pemerintah juga harus bisa memahami dan menanggulangi segala hambatan yang terjadi pada saat melakukan pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Study Kasus Pada Kabupaten Kediri)".

Metode Penelitian

Metode analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa, "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi".

Sedangkan untuk memaparkan upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) peneliti

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Mukhtar (2013) yang menyatakan bahwa, "metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu".

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) menyatakan bahwa, "informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis". Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, data penelitian ini diperoleh dari subjek dengan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian sebagai informan. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel, namun penelitian kualitatif mempunyai maksud untuk membuat generalisasi dari penelitian yang dilakukan.

Adapun informan/narasumber pada penelitian ini antara lain:

1. Pihak pemerintah yang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri, antara lain Kepala Dinas, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kabid Kepariwisata, dan Kasi Promosi Pariwisata.
2. Pihak swasta yang melaksanakan kemitraan dengan pemerintah dalam membangun dan mengelola objek wisata.
3. Pihak masyarakat yang berada di sekitar lingkungan objek wisata.

Sedangkan lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kabupaten Kediri yang difokuskan pada dinas-dinas yang terkait, dan bertugas dalam menangani dan mengelola pariwisata di daerah Kabupaten Kediri. Untuk pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan selang waktu selama kurang lebih selama 3 bulan, dari bulan Februari sampai dengan April 2020. Akan tetapi, dikarenakan mewabahnya pandemik virus corona (Covid-19) membuat penelitian ini menjadi diperpanjang lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada menjadi 6 bulan atau sampai dengan bulan Juli 2020. Menurut Suharsimi Arikunto (2006) menjelaskan bahwa, "instrument penelitian

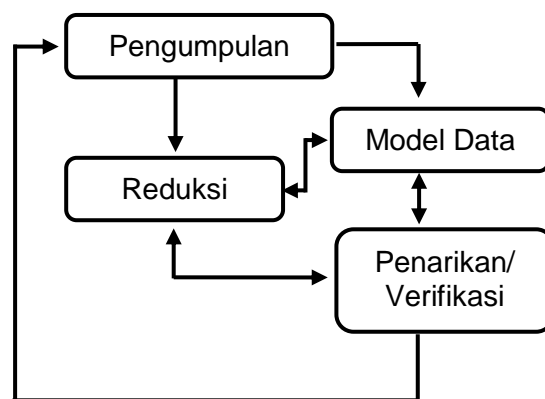
adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam menumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga mudah diolah". Sedangkan menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa, "dalam

penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri".

Dari dua pendapat tersebut di atas maka, pada penelitian ini peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban yang akurat, tidak menyimpang, dan mampu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Pedoman wawancara ini tidak mengikat jalannya wawancara, akan tetapi pedoman wawancara digunakan sebagai kontrol peneliti selama proses penelitian. Jadi, pedoman wawancara ini digunakan untuk membawa ke dalam pokok persoalan dan tidak bersifat kaku. Menurut Sugiyono (2010: 308) menjelaskan bahwa, "teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data". Pada penelitian ini menggunakan sumber data masyarakat dan pemerintah daerah dengan memberikan respon serta informasi tentang perannya terhadap pengembangan pariwisata. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Sedangkan untuk metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi sumber dengan tujuan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek pada sumber yang berbeda dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan adalah dengan memaparkan gambaran implementasi sektor pariwisata yang dianalisis melalui pengkajian dan pemaparan data. Setelah itu, diuraikan berdasarkan tempat, gambaran implementasi pengembangan sektor pariwisata, analisis kata-kata, laporan detail sesuai dengan yang didapatkan dari informan, dan perilaku

subjek penelitian secara alamiah (*natural setting*). Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pendapat menurut Miles & Huberman (2009) dalam mengolah dan menganalisis data secara kualitatif dari data yang diperoleh adalah dengan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Komponen Analisis Data
(Sumber data: Miles & Huberman, 2009)

Hasil Dan Pembahasan Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang biasa disingkat Disparbud Kabupaten Kediri merupakan salah satu lembaga pemerintahan Kabupaten Kediri yang berorientasi pada bidang kepariwisataan dan kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Kediri. Disparbud ini beralamatkan lengkap di Jalan Erlangga Nomor 1 Kediri.

Secara khusus, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri memiliki tugas dalam membantu Bupati melaksanakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut:

1. Misi Disparbud

Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.

2. Tujuan Disparbud

- Meningkatkan kinerja sektor pariwisata.
- Meningkatkan kualitas kelompok seni dan budaya.

3. Sasaran Disparbud
 - a. Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Kediri.
 - b. Meningkatkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisi yang ada di Kabupaten Kediri.
4. Indikator Sasaran Disparbud
 - a. Kenaikan jumlah kunjungan wisata.
 - b. Peningkatan destinasi wisata.
 - c. Tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat.
 - d. Peningkatan budaya lokal yang dilestarikan.
 - e. Peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan.
 - f. Peningkatan kelompok seni budaya yang diberdayakan.
 - g. Cagar budaya yang dilestarikan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri berjalan dan menjalankan segala yang ada pada ruang lingkupnya dengan berlandaskan pada Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dan Perbub No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan juga berdasarkan pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 yang sekarang telah digantikan dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang kesemuanya tersebut dikembangkan dalam pelaksanaannya yang memiliki fungsi penunjang keuangan mulai dari tanggal 01 Januari 2017.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas, dan fungsinya memiliki visi, dan misi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Visi Bapenda

Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional.

Misi Bapenda

Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas, dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil, dan mikro.

Kondisi Pariwisata Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah di propinsi Jawa Timur yang memiliki kekayaan beragam di bidang industri pariwisata. Industri pariwisata di Kabupaten Kediri ini mencakup wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata buatan. Kekayaan dari sektor ini tidak lepas dari potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri itu sendiri antara lain adalah letaknya strategis sebagai pintu gerbang antara daerah Kabupaten atau Kota dan merupakan lintasan antara dua destinasi nasional, yaitu Yogyakarta dan Bali. Selain itu, banyaknya objek wisata yang memiliki potensi sebagai wisata unggulan bahkan menjadi destinasi utama para pengunjung atau wisatawan. Kedua potensi tersebut didukung juga oleh tingginya motivasi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata, dan tersedianya Peraturan Daerah dibidang kepariwisataan.

Kondisi wisata di daerah Kabupaten Kediri ini dapat digambarkan secara detail berdasarkan banyaknya tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Data Tempat Wisata Daerah Kabupaten Kediri

No.	Klasifikasi Wisata	Tempat Wisata
A.	Pemerintah Kabupaten Kediri (Disparbud)	1. Gunung Kelud
		2. Wana Wisata Ubalan
		3. Kawasan Wisata Besuki
		4. Wana Wisata Sumber Podang
		5. Taman Ria Corah
		6. Kawasan Wisata Surowoto
		7. Kawasan Wisata SLG
		8. Kawasan Wisata Puhsarang
		9. Bendung Gerak Waru Turi
		10. Kawasan Wisata Sri Aji Joyoboyo
B.	Swasta	11. Gumul Paradise Island (GPI)
		12. Kampung Inggris Pare
		13. Argowisata Sepawon
		14. Kampung Luwak
		15. Kediri Waterpark
		16. Ndalem Pojok Situs Bung Karno
		17. Kampung Anggrek SSP
		18. Bukit Dhoho Indah (BDI)
		19. Indian Village
		20. Melta Waterland Kediri
C.	Desa Wisata	21. Desa Wisata Jambu
		22. Desa Wisata Medowo
		23. Desa Wisata Ngadi
		24. Desa Wisata Jugo
		25. Desa Wisata Joho
		26. Desa Wisata Tawang
		27. Sumber Sugih Waras
		28. Gronjong Wariti
		29. Kampung Labu
		30. Wisata Ongakan
D.	Cagar Budaya	31. Situs Gambyok
		32. Situs Candi Dorok
		33. Situs Calon Arang
		34. Situs Arca Tokok Kerot
		35. Situs Namba'an
		36. Situs Prasasti Pohsarang
		37. Situs Candi Surowono
		38. Situs Candi Tegowangi
		39. Situs Semen
		40. Situs Tondowongso
		41. Prasasti Tangkulan
		42. Situs Brumbung
		43. Situs Tungkur
		44. Situs Adan-adan

(Sumber data: Disparbud Kab. Kediri Tahun 2020)

Tabel 1.3 Data Pengunjung Wisata dari Objek Wisata Daerah Kabupaten Kediri yang Dikelola Langsung Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

No.	Tempat Wisata	Tahun (Wisnus + Wisman)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kawasan Wisata SLG	594.330	660.992	822.413	1.519.730	1.658.551
2.	Gunung Kelud	199.160	270.273	365.176	332.899	320.405
3.	Bendung Gerak Waru Turi	137.350	131.986	139.476	144.184	123.958
4.	Wana Wisata Ubalan	80.123	100.551	101.662	93.895	75.840
5.	Kawasan Wisata Besuki	47.730	59.234	65.620	65.489	87.861
6.	Kawasan Wisata Puhsarang	27.794	35.541	49.373	29.545	94.973
7.	Kawasan Wisata Surowono	49.415	58.775	47.356	18.723	16.431
8.	Kawasan Wisata Sri Aji Joyoboyo	22.008	28.068	13.946	13.887	52.420
9.	Wana Wisata Sumber Podang	17.198	17.546	21.516	35.533	37.704
10.	Taman Ria Corah	3.864	3.338	14.315	22.793	19.075
Jumlah Total Pengunjung		1.178.972	1.366.304	1.640.853	2.276.678	2.487.218
Rata-rata Pengunjung		117.897	136.630	164.085	227.668	248.722

(Sumber data: Disparbud Kab. Kediri Tahun 2020)

Tabel 1.4 Data Pengunjung Wisata dari Objek Wisata Daerah Kabupaten Kediri yang Dikelola Oleh Pihak Swasta Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

No.	Tempat Wisata	Tahun (Wisnus + Wisman)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kampung Inggris Pare	157.914	128.682	128.288	133.591	276.120
2.	Gumul Paradise Island (GPI)	180.442	135.059	132.153	116.548	93.812
3.	Kampung Anggrek SSP	-	136.475	207.062	145.502	122.198
4.	Kediri Waterpark	193.598	122.240	23.173	101.918	92.452
5.	Indian Village	-	-	-	185.338	129.710
6.	Bukit Dhoho Indah (BDI)	-	-	31.658	47.829	141.558
7.	Ndalem Pojok Situs Bung Karno	-	-	7.789	6.118	5.833
8.	Melta Waterland Kediri	-	-	-	40.303	74.536
9.	Kampung Luwak	1.097	1.639	1.396	1.329	241
10.	Argowisata Sepawon	1.679	1.372	133	59	211
Jumlah Total Pengunjung		534.730	525.467	531.652	778.535	936.671
Rata-rata Pengunjung		106.946	87.578	66.457	77.854	93.667

(Sumber data: Disparbud Kab. Kediri Tahun 2020)

Tabel 1.5 Data Pengunjung Wisata dari Objek Wisata Daerah Kabupaten Kediri yang Dikelola Oleh Pemerintah Desa atau Desa Wisata Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

No.	Tempat Wisata	Tahun (Wisnus + Wisman)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Desa Wisata Jambu	-	-	-	12.943	260.973
2.	Sumber Sugih Waras	-	-	-	42.159	94.491
3.	Desa Wisata Ngadi	-	-	-	-	101.616
4.	Gronjong Wariti	-	-	-	-	86.871
5.	Wisata Ongakan	-	-	32.016	6.162	2.018
6.	Desa Wisata Tawang	-	-	-	-	25.901
7.	Desa Wisata Medowo	-	-	-	-	18.731
8.	Kampung Labu	-	-	-	-	15.115
9.	Desa Wisata Jugo	-	-	-	-	13.962
10.	Desa Wisata Joho	-	-	-	-	2.572
Jumlah Total Pengunjung		-	-	32.016	61.264	622.250
Rata-rata Pengunjung		-	-	32.016	20.421	62.225

(Sumber data: Disparbud Kab. Kediri Tahun 2020)

Tabel 1.6 Data Pengunjung Wisata dari Objek Wisata Daerah Kabupaten Kediri yang Dikelola Oleh Cagar Budaya Wisata Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

No.	Tempat Wisata	Tahun (Wisnus + Wisman)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Situs Candi Tegowangi	32.251	55.867	48.448	59.557	66.238
2.	Situs Arca Tokok Kerot	7.470	13.812	14.651	12.954	13.874
3.	Situs Candi Surowono	-	-	-	28.718	23.666
4.	Situs Semen	5.502	6.868	7.143	7.592	8.106
5.	Situs Calon Arang	3.496	8.446	9.818	2.310	8.998
6.	Situs Tungkur	3.090	3.782	3.951	4.200	4.440
7.	Situs Tondowongso	92	1.113	2.293	4.197	4.976
8.	Situs Candi Dorok	935	2.274	3.327	2.435	1.641
9.	Prasasti Tangkilan	175	815	1.878	5.368	882
10.	Situs Gambyok	-	-	722	1.436	1.658
11.	Situs Namba'an	113	307	500	775	1.371
12.	Situs Adan-adan	-	-	-	1.271	1.543
13.	Situs Prasasti Pohsarang	-	-	-	959	1.112
14.	Situs Brumbung	12	82	-	-	1.364
Jumlah Total Pengunjung		53.136	93.366	92.731	131.772	139.869
Rata-rata Pengunjung		5.314	9.337	9.273	10.136	9.991

(Sumber data: Disparbud Kab. Kediri Tahun 2020)

Berdasarkan paparan beberapa tabel di atas dapat diketahui bahwa, kondisi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri senantiasa berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya tempat pariwisata ini semakin bertambah banyak yang artinya potensi dari sektor pariwisata ini semakin tahun semakin banyak yang ditemukan. Selain itu, dapat dilihat dari kenaikan jumlah total pengunjung dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kemaren yang semakin melonjak dari tahun ke tahunnya. Secara tidak langsung rata-rata pengunjung setiap tahunnya juga mengalami kenaikan yang signifikan.

Jadi, kondisi wisata di daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sektor penunjang pembangunan daerah melalui pendapatan dari tempat-tempat wisata tersebut yang hasilnya

disetorkan langsung kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri.

Perkembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkembangan sektor pariwisata ini merupakan sebuah langkah pasti dan jelas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena, dalam melakukan segala perubahan dan pengembangan tidak hanya cukup adanya berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah, tetapi harus adanya langkah yang pasti dan jelas dari pihak atau dinas yang terkait.

Beberapa paparan yang dijelaskan di atas dilengkapi, dan diperkuat lagi dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak EKO WASKITO SUKARDI, S.E., selaku Kasubag Keuangan Disparbud Kabupaten Kediri pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020. Wawancara yang dilakukan ini untuk membahas berbagai hal yang terkait perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

“Iya, disesuaikan dengan kebutuhan setiap objek wisata. Pelaksanaan perencanaan ini nantinya dievaluasi sesuai dengan kebutuhan objek wisata, dan juga dari trend masyarakat pada saat itu”.

“Iya, dengan menetapkan regulasi Perda yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata di Kabupaten Kediri. Regulasi terkait PAD pariwisata ini yaitu Perda No. 16 Tahun 2011, dan Perbup No. 4 Tahun 2012”.

“Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terkait pengembangan objek pariwisata di daerah Kabupaten Kediri yaitu peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, dan pemeliharaan sarpras yang ada di objek wisata tersebut”.

“Pendanaan yang ada mencukupi, dan alokasi anggarannya kita dibagi untuk sekretariat, pemasaran, pengembangan pariwisata, kesenian, dan juga kebudayaan”.

“Ya tentu melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata, semua pihak disekitar objek wisata, dan juga para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait”.

“Iya pasti. Pemasaran ini dilakukan dengan cara kegiatan promosi baik di dalam atau di luar daerah, mengadakan dan mengikutkan pameran pariwisata, mengikutsertakan dalam pagelaran pariwisata, dan mengundang pelaku wisata”.

“Beberapa dinas terkait antara lain Bapenda, Perkim, DLH, Diskominfo, Bagian Umum, Forkopinda, Dinas Koperasi, dan ada beberapa yang lain”.

“Bupati telah menginstruksikan kerjasama antar instansi terkait, dan saat ini setiap program kegiatan kita tidak ada yang tumpang tindih”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melakukan berbagai langkah seperti pembangunan dan revitalisasi objek wisata, pembinaan pelaku wisata, dan promosi wisata ke dalam maupun ke luar daerah sebagai langkah dan upaya agar tercapainya target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.

Selain itu, pihak pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melakukan perencanaan sebelum melakukan upaya pengembangan objek atau sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian direvisi dengan disesuaikan dengan kebutuhan objek wisata, dan trend yang terjadi pada masyarakat secara luas pada saat dan tahun tertentu.

Untuk memperkuat pengembangan Disparbud menetapkan regulasi atau peraturan sebagai acuan dan dasar guna keterlaksanaan pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicermati oleh berbagai pihak, dan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang kemudian melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait termasuk pelaku usaha wisata, pihak yang ada disekitar objek

wisata, dan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait dengan pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, pelaksanaan sosialisasi ini akan sangat percuma apabila pihak pemerintah daerah terkait tidak ikut membantu dalam melakukan pemasaran objek pariwisata yang sedang dikembangkan.

Pemasaran ini dilakukan dengan cara melakukan promosi tempat atau objek pariwisata di dalam daerah sendiri atau di luar daerah. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam mengadakan, dan mengikutsertakan para pelaku wisata ini untuk ikut berpartisipasi dalam pameran, dan pagelaran pariwisata. Lebih dari pada itu, dinas terkait juga mengundang para pelaku wisata untuk mencoba mengunjungi objek pariwisata yang sedang disuguhkan dan masuk dalam proses pengembangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.

Semua yang dilakukan oleh pihak dinas terkait menyusun dan menjalankan program yang telah disetujui Pemerintah Kabupaten Kediri dengan melaksanakan peningkatan, dan pemeliharaan sarana prasarana objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sarana dan prasarana yang dikembangkan dan dipelihara ini adalah termasuk sarana hiburan, dan berbagai prasarana dasar yang perlu diperhatikan di tempat pariwisata seperti toilet, dan lain-lain. Hal ini sudah dipertimbangkan dengan adanya ketersediaan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk pengembangan objek pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri dirasa sudah mencukupi. Hal ini dibuktikan dari pengalokasian dana yang dibagi ke berbagai sub bagian diantaranya sekretariat, pemasaran, pengembangan pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Kesemuanya ini dikelola dengan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Kediri demi ketercapaian tujuan periode pemerintahan Kabupaten Kediri yang salah satunya terfokus ada sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dalam praktiknya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Bapenda, Perkim, DLH, Diskominfo, Bagian Umum, Forkopinda, dan Dinas Koperasi untuk dapat membantu dalam mengembangkan objek pariwisata atau sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Sedangkan bentuk kerjasama yang dibentuk ini tidak dijelaskan secara rinci, hanya disesuaikan dengan instruksi Bupati Kediri agar adanya kerjasama antar instansi terkait, dan sampai dengan saat ini pelaksanaan kerjasama ini tidak membuat berbagai kegiatan menjadi tumpang tindih atau rancu.

Tabel 1.7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2015 s/d Tahun 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata	
	Target Pendapatan (Rp)	Pendapatan yang Dicapai (Rp)
2015	3.100.000.000	3.447.898.620
2016	3.100.000.000	1.827.998.880
2017	3.100.000.000	5.583.926.200
2018	3.100.000.000	5.180.220.080
2019	3.100.000.000	4.910.050.500
Rata-rata	3.100.000.000	4.190.018.856

(Sumber data: Bapenda Kab. Kediri Tahun 2020)

Dari tabel 1.7 di atas dapat diketahui bahwa, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan dapat melebihi dari target pencapaian yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Hal ini dapat ditunjukkan dari rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi kurang lebih sebesar Rp 4.190.018.856,00,- atau dapat melebihi target pendapatan yang telah ditentukan sebesar 84,81%. Jadi, dari data yang telah dipaparkan di atas sektor pariwisata mempunyai potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan di daerah Kabupaten Kediri

dan dapat memberikan kontribusi berupa kenaikan masukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.

Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Perkembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, ada juga beberapa faktor pendukung lain dalam rangka pengembangan objek pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri yang dipaparkan pada hasil wawancara di bawah ini:

“Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Kediri antara lain seperti regulasi yang ditetapkan, SDM yang ada dan menguasai dalam bidang pariwisata, ketersediaan anggaran, dan partisipasi dari warga Kabupaten Kediri”.

“Tentunya dalam pengembangan objek wisata ini perlu adanya pengawasan untuk mengatur pengelolaan tata cara pengembangan pariwisata ini guna nantinya semua bermuara pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten yang pasti untuk kemajuan daerah juga. Seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan tentu juga pastinya oleh inspektorat”.

“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri dari sektor pariwisata bisa tercapai dengan baik, meskipun ada penurunan dengan beberapa faktor penyebab yang kita tidak bisa hindari”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, regulasi yang sudah ditetapkan dan dijadikan pedoman, SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya, adanya anggaran dana yang cukup, dan partisipasi nyata dari masyarakat Kabupaten Kediri secara umum menjadi faktor pendukung yang jelas dan pasti dalam mengembangkan objek pariwisata atau sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.

Selain itu dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, dan Inspektorat

Kabupaten secara langsung ikut dalam pengaturan pengawasan pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan karena, semua nantinya bermuara untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan daerah kita bersama khususnya sektor pariwisata Kabupaten Kediri.

Apa yang telah dilakukan ini terbukti berhasil dan benar-benar dapat tercapai tujuannya yang ditandai dengan hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa, sektor pengembangan pariwisata yang telah dilakukan benar-benar berimbas kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Hal ini diperkuat adanya data pada tabel 1.3 yang menjelaskan peningkatan pengunjung daya tarik wisata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang lalu. Akan tetapi, hasil wawancara juga menyatakan adanya penurunan karena adanya beberapa faktor yang tidak bisa dihindari. Maksud dari penurunan ini bukan berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri menurun, tetapi data dan tempat wisata yang masuk menjadi benar-benar asli milik aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) tidak sebanyak seperti pada tabel 1.3 di atas.

“Ketika kita atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri melakukan pengembangan objek wisata ini tentunya tidak berjalan lancar-lancar saja, akan tetapi ada jalan terjal yang menghambat seperti masih rendahnya kualitas SDM kita dalam bidang kepariwisataan, terbatasnya sarpras yang ada, terbatasnya jaringan pemasaran Kabupaten Kediri khususnya, belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata karena kualitas SDM tadi, dan RIPPDA atau Rencanna Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang ada belum diaplikasikannya secara fisik karena belum berkekuatan hukum”.

Hambatan-hambatan tersebut di atas ini yang menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Kediri secara khusus, dan dinas-dinas terkait pengembangan objek

wisata tentunya secara umumnya. Maka, perlu dilakukan beberapa langkah untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut. Adapun penanggulangan hambatan yang dilakukan seperti yang disampaikan pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita semua sampai hari ini terus berusaha meningkatkan dan memilih secara selektif kualitas SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan, terus menerus menjaga dan memelihara pengembangan dan pembangunan sarpras di suatu objek wisata, mencoba menggunakan media sosial dan komunitas-komunitas dalam memasarkan wisata dan kebudayaan di Kabupaten Kediri, tentunya melakukan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata dan kebudayaan ini, dan terakhir melestarikan potensi cagar budaya yang ada”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, dalam melakukan pengembangan objek pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri masih memiliki beberapa hambatan yang belum terselesaikan sampai dengan sekarang ini. Hambatan yang terjadi tersebut diantaranya adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola objek wisata dan kepariwisataan pada umumnya, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung objek wisata dan informasi kepariwisataan di Kabupaten Kediri, masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri, belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Kediri, dan sudah ada RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) namun belum bisa diaplikasikan secara fisik/nyata, karena belum berkekuatan hukum.

“Kita semua sampai hari ini terus berusaha meningkatkan dan memilih secara selektif kualitas SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan, terus menerus menjaga dan memelihara pengembangan dan pembangunan sarpras di suatu objek wisata, mencoba menggunakan media sosial dan komunitas-komunitas dalam memasarkan

wisata dan kebudayaan di Kabupaten Kediri, tentunya melakukan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata dan kebudayaan ini, dan terakhir melestarikan potensi cagar budaya yang ada”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) bersama Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan berbagai upaya dan tindak lanjut agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri ini dapat terselesaikan dengan baik. Tindak lanjut yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan, menjaga dan memelihara pengembangan dan pembangunan sarpras objek wisata, menggunakan media sosial dan berbagai komunitas dalam memasarkan wisata dan kebudayaan Kabupaten Kediri, melakukan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata dan kebudayaan secara berkala, dan melestarikan potensi cagar budaya yang ada.

Kesimpulan

Kondisi wisata di daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sektor penunjang pembangunan daerah melalui pendapatan dari tempat-tempat wisata tersebut yang hasilnya disetorkan langsung kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri.

Pengembangan objek pariwisata yang telah dilakukan dengan baik ini benar-benar berimbas kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.

Faktor pendukung dalam rangka pengembangan objek pariwisata untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri diantaranya adalah :

- a. regulasi yang sudah ditetapkan dan dijadikan pedoman,
- b. SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya,

- c. adanya anggaran dana yang cukup,
 - d. partisipasi nyata dari masyarakat Kabupaten Kediri
- Hambatan yang terjadi terkait pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri diantaranya adalah :
- a. masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
 - b. masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung objek wisata dan informasi kepariwisataan,
 - c. masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata,
 - d. belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata,
 - e. sudah ada RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) namun belum bisa diaplikasikan secara fisik/nyata, karena belum berkekuatan hukum.

Referensi

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmata, R. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Edisi Revisi 2010*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyanto. 2005. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzahra, Fatimah & Sujali. 2013. *Pengembangan Pariwisata Alam Kawasan Ciwidey di Kabupaten Bandung*. Jurnal Universitas Gajah Mada.
- Darsoprayitno, Soewarno. 2012. *Ekologi Pariwisata: Tata Laksana Pengelolaan Obyek dan daya Tarik Wisata*. Jakarta: Angkasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djogo, Tony, Sunaryo, Suharjito, Didik & Sirait, Martua. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Agroforestry*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartoyo, Nafsi. 2017. *Optimalisasi Aset Negara/Daerah*. Diunduh tanggal 02 Maret 2019. (www.bppk.depkeu.go.id).
- Optimalisasi PAD Untuk Peningkatan Kinerja Pemda*. Diunduh tanggal 02 Maret 2019. (www.bppk.depkeu.go.id).
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indra Rindu Datu K. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar Tahun 1999-2009*. Skripsi. FEB. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Karlof, Bengt & Ostblom, Svante; Budi Rahardjo (penerj). 1997. *Benchmarking*. Yogyakarta: Andi.
- Koswara, E. 2011. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Misdyahti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Mulyana, D. & Rakhmat, J. 2009. *Komunikasi Antar Budaya*:

- Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munasef. 2005. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurhayati. 2008. *Studi Perbandingan Metode Sampling Antara Simple Random dengan Stratified Random*. Jurnal Basic Data. ICT Research UNAS. Vol.3 No.1. dalam <http://old.unas.ac.id>
- Pamudji. 1996. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, I.G., dan Diarta, I.K.S. 2009. *Ekonomi Hijau dalam Pariwisata*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Spillane, James J. 2006. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subagio, Amin. 2005. *Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah)*. Bogor: Sekolah Pasca Sarajana Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling; Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Saleh. 1996. *Manajemen Pariwisata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Wardianta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kompas.
- Zebua. 2016. *Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Peraturan Per-Undang-Undangan:**
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepariwisata*. Jakarta: Sekretaris Negara.